

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Hari : Senin
Tanggal : 19 November 2018
Pukul : 14.05 s/d 15.18 Wib
Acara : 1. Penyampaian/penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.
2. Pandangan umum Fraksi-fraksi
3. Jawaban/tanggapan Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Agus Wibowo
3. H. Tri Jono, S.Kom, MM
4. Daeng M. Yatir, SH
5. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
6. Hj. Siti Maryani, S.Kom
7. Muttaqin
8. Hesti Gustrian, S.ST
9. Azman, SE
10. Hasriawady, S.IP
11. H. Lamén Sarihi, SH, MH
12. Zulkifli, S.Pd
13. Umar Ali Rangkuti, A.Md
14. Andreas Salim
15. H. Amran, S.IP
16. Bani Suparti, A.Md
17. Suardi, S.Sos

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drs. Edi Yusri

Turut Hadir :

1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
3. Setda Kabupaten Bintan
4. Pimpinan OPD Kabupaten Bintan
5. Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Bintan
6. Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan
7. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan. Senin, 19 November 2018 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

Bismillahrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan 2 (dua) bait pantun, yakni :

Cek mamat nak pergi kondangan
Tak ada dut menyumbanglah beras
Selamat datang para tamu undangan
Di acara penyampaian APBD tahun 2019
Selayang pandang bintang negeri
Negeri nak elok indah berseri
Mau dengarkan pandangan setiap fraksi
Disambut dengan jawaban pak Bupati

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Saudara Bupati Bintan. Yang terhormat Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Pimpinan Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta lainnya se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara para Camat, Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Pimpinan BUMN, BUMD dan Swasta lainnya. Yang terhormat saudara Rekan-rekan Wartawan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat kembali hadir bersama diruangan ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara :

1. Penyampaian/penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.
2. Pandangan umum Fraksi-fraksi
3. Jawaban/tanggapan Kepala Daerah atas pandangan umum Fraksi-fraksi

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan Tahun No.004/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 Pasal 84 Ayat 2 Point b dikatakan Rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD Bintan. Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD dengan perincian hadir 17 orang, sakit 2 orang dan izin 6 orang. Karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan Bismillahrahmanirrahim maka rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Senin, tanggal 19 November 2018 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

_____ Palu diketok 3 (tiga) kali _____

Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, dalam hal ini APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu 1 tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, pada pasal 1 ayat (2) bahwa pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APBD. Pada pasal 2 ayat (1) bahwa pedoman

APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi :

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kebijakan pemerintah.
- b. Prinsip penyusunan APBD.
- c. Kebijakan penyusunan APBD.
- d. Tehnis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Dalam hal ini, pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Kebijakan umum penyusunan anggaran yang dituangkan didalam APBD Tahun Anggaran 2019, hendaknya difokuskan kepada bidang pendidikan, bidang kesehatan, transfer dana desa, peningkatan infra struktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan. Agar semua program dan kegiatan prioritas terbiayai secara optimal sesuai dengan manfaat, kepatutan, efektifitas dan efisiensi.

Dengan menggunakan dasar RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021, APBD memiliki peranan yang sangat penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan, terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sinergi yang baik dan komitmen bersama, khususnya antara Eksekutif dan Legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 ini, pembahasannya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga penetapan Persetujuan Bersama Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan*.

Protokol :

Penyampaian penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan APBD Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019. Kepada Bupati Bintang disilahkan.

H. Apri Sujadi, S.Sos / Bupati Bintang :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang; Yang terhormat saudara Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintang; Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang; Yang terhormat saudara Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat hadir pada rapat sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Sidang Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Merupakan momen yang sangat penting bagi kita bersama mengingat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 ini merupakan wujud konkrit dari kerja bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam rangka melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bintang.

"Insha Allah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tersebut akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintang dan demi menjadikan Kabupaten Bintang sebagai kabupaten yang maju, harmonis, berbudaya dan memiliki daya saing tinggi. Rancangan APBD tahun 2019 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mencapai sasaran pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, kita telah menyusun pondasi dengan mereformasi arah pembangunan daerah menjadi lebih produktif, merata dan

berkeadilan.

Bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Dalam konteks meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, dalam proses perencanaan dan penganggaran telah menggunakan sistem e-planning dan system e-budgeting, suatu system yang saling terintegrasi. E-planning dan e-budgeting merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan adanya e-planning dan e-budgeting, ini diharapkan dapat terbangun sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah, memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan semua stakeholder terhadap akses informasi, sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.

*Ketersediaan informasi di dalam e-planning nantinya akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah, dengan adanya e-planning ini diharapkan dapat menjangkau masukan dan menjadi ajang berbagi pengalaman dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-budgeting dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, penerapan sistem juga sesuai dengan semangat peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan.

Namun kita menyadari bahwa sistem yang kita bangun belum sempurna dari itu kami mohon kepada semua pihak untuk berperan aktif dalam memberi masukan dan saran. Dalam kesempatan ini juga saya berharap kepada semua stakeholder untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan program kegiatan pada anggaran tahun 2019.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pemberian alokasi anggaran juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pengeluaran (*mandatory spending*) pada kegiatan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dan belanja modal guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan;
2. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Kabupaten Bintan berdasarkan penyusunan anggaran berbasis kinerja, yang mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban dan bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Dalam konteks meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada tugas pokok dan fungsi masing-masing skpd guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Dan tetap berpedoman kepada kebijakan umum APBD dan prioritas dan pelapori anggaran sementara tahun anggaran 2019 sebagaimana yang telah kita sepakati bersama beberapa waktu yang lalu. Kebijakan pembangunan kabupaten bintan tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pemantapan infrastruktur di daerah pulau-pulau serta pemantapan potensi dasar perekonomian rakyat. Melalui prioritas pembangunan, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat bintan yang lebih maju, sejahtera dan berbudaya.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas Rancangan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

- **Pendapatan Daerah.**

Pendapatan APBD tahun 2019 diproyeksi sebesar 1,050 triliun rupiah lebih yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 239,75 milyar rupiah lebih; dana perimbangan sebesar 693,87 milyar rupiah lebih; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 116,70 milyar rupiah lebih.

- **Belanja Daerah.**

Belanja daerah diproyeksikan sebesar 1,138 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 561,57 milyar rupiah lebih, sedangkan belanja langsung sebesar 577,13 milyar rupiah lebih.

• **Pembiayaan Daerah**

Pada sisi pembiayaan mengalami perubahan, terutama dari sisi penerimaan pembiayaan. Pada tahun anggaran 2019 penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun yang lalu di proyeksikan sebesar 90,374 milyar rupiah lebih. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan merencanakan investasi berupa penyertaan modal pada BPR Bintan sebesar 2 milyar rupiah.

Dari komposisi pendapatan dan belanja, bahwa defisit tahun anggaran 2019 sebesar 88,374 milyar rupiah lebih. Sedangkan dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, kemampuan pembiayaan netto sebesar 88,374 milyar rupiah lebih, sehingga secara struktur sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan sebesar nol rupiah.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Dengan disampainya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, menjadi harapan kita semua untuk dapat segera dibahas dan mendapatkan pengesahan, sehingga dapat memenuhi jadwal, walaupun mungkin secara tahapan kita menyadari masih belum sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Sebelum saya akhiri, untuk melestarikan adat resam negeri ini, perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun sebagai berikut :

Sayur nangka sebagai hidangan

Di hidang pula di dalam pinggan

Ranperda APBD kami serahkan

Segera dibahas bersama dewan

Letih berjalan di tengah pekan

Singgah digeral membeli minuman

terimakasih kami sampaikan

Khilaf dan salah mohon dimaafkan

Terima kasih atas perhatiannya, akhir kata bilahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 19 November 2018. Bupati Bintan, **H. Apri Sujedi, S.Sos** ditandatangani.

Protokol:

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi dari DPRD Kabupaten Bintan. Kepada juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya, disilahkan.

H. Amren, S.IP / Fraksi Partai Golongan Karya :

Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Bismillahir Rohmanir Rahieem, Aassalamuataikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Yang terhormat Para Undangan, Rekan-rekan Insan Pers dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita semua masih di beri kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengikuti sidang Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini, sehingga kita dapat

menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing dan berpedoman kepada norma serta ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih dan rasa syukur, sampai hari ini Fraksi Partai Golongan Karya masih berkesempatan untuk menyampaikan Pandangan Umum pada forum yang sangat terhormat ini.

Rapat Dewan terhormat,

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019", perkenankan Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bintang menyampaikan pandangan umum Fraksi antara lain sebagai berikut :

1. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kurun waktu meliputi satu tahun terhitung mulai Januari sampai dengan Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :
 - Anggaran Pendapatan, yang terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Bagian Dana Perimbangan (DAU dan DAK)
 - Lain-lain pendapatan yang sah
 - Anggaran Belanja, yang di gunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.
 - Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa di anggarkan dalam APBD maka tidak memiliki kekuatan untuk di laksanakan.
 - Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
 - Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus di arahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.
 - Fungsi Distribusi mengandung makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, pemerataan dan kepatutan.
 - Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
3. Dari 2 (Dua) point yang di kemukakan di atas, Fraksi Partai Golongan Karya berharap dalam menyusun dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang benar-benar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Aspiratif , yaitu memperhatikan harapan dan keinginan masyarakat agar realisasi APBD tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - Kooperatif, yaitu bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bintang dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dalam rangka meningkatkan peran dalam pembangunan Kabupaten Bintang, sesungguhnya Kabupaten Bintang adalah milik bersama masyarakat Kabupaten Bintang , bukan milik kelompok/bukan milik seseorang/bukan milik golongan tertentu, sehingga dengan melibatkan sebanyak-banyaknya Sumber Daya manusia yang ada, maka kita akan semakin yakin Kabupaten Bintang akan semakin maju dan berkembang.
 - Dalam perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar memprioritaskan Bidang Kesehatan dan Pendidikan serta peningkatan perekonomian masyarakat, baru fasilitas infrastruktur yang betul-betul sesuai kebutuhan dan kondisi yang dapat menunjang lajunya pertumbuhan perekonomian masyarakat.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga jangan mengabaikan peningkatan dan pendidikan moral, akhlak serta peningkatan bidang keagamaan yang sangat penting menjadi dasar spiritual kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Fraksi Partai Golongan Karya berharap agar Pemerintah Kabupaten Bintan dapat berlaku adil dan merata secara proporsional dalam perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan agar tidak ada kecemburuan sosial dan ketimpangan pembangunan untuk 10 (sepuluh) Kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bintan.

Rapat Dewan terhormat,

Demikian pandangan umum ini disampaikan, Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 untuk dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan. Bila dalam penyampaian pandangan umum ini terdapat kekurangan, kekeliruan dan kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesabaran seluruh peserta Rapat, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya atas segala niat baik kita. Aamiin.

Malam-malam makan kue gegetas

Cik Muktar datang membawa kue lepat

Dalam perencanaan APBD 2019

Agar masyarakat dapat merasakan manfaat

Billahi taufik Walhidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Bandar Seri Bentan, 19 November 2018. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, **Hj. Fiven Sumanti, S.IP** ditandatangani. Sekretaris, **H. Amran, S.IP** ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian pandangan umum Fraksi dari Fraksi Partai Demokrat. Kepada juru bicara Fraksi disilahkan.

Azman, SE / Fraksi Partai Demokrat :

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Bintan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Dewan Beserta Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara unsur Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang terhormat Para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Yang terhormat Para Undangan, Rekan-Rekan Insans Pers, serta hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izinNya kita diberi kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna dewan, dengan agenda pokok penyampaian dan pandangan umum Fraksi fraksi dalam mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Saudara Bupati, rapat dewan yang terhormat...

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah dalam mewujudkan dan mencapai tujuan Pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai instrumen anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah dan atau wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya. Dengan adanya rancangan APBD tahun 2019 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Pendapatan Asli Daerah memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah atau rumah tangga daerahnya perkiraan terhadap Pendapatan Daerah sebagaimana yang tergambar pada anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Bintan 2019 mengalami kenaikan untuk tahun anggaran 2018 (sebelum perubahan) yakni sebesar 4,63 % dibandingkan dengan priode 2017-2018 yakni sebesar 2,33%. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami penurunan dari PAD 2018 sebesar 5,9%. Dana perimbangan bertambah sebesar 6,12%. Dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah sebesar 22,64%.

Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 menunjukkan peningkatan sebesar 6,73% belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 (sebelum perubahan) sebesar 1.066.877.413.789,96 (1 Triliun 66 Milliar 877 Juta 413 Ribu 789 Rupiah 96 Sen) dan mengalami peningkatan pada APBD 2019 sebesar 1.138.707.872.734 (1 Triliun 138 Milliar 707 Juta 872 Ribu 734 Rupiah). Dengan alokasi untuk masing-masing kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar 50,68%. dan belanja langsung sebesar 49,32%.

Saudara Bupati, rapat dewan yang terhormat...

Sebagaimana rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018, maka Fraksi Demokrat memberikan Pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi demokrat meminta kepada pemerintah untuk melakukan penghematan belanja daerah karena dengan hal ini akan dapat melakukan kegiatan yang skala prioritasnya mengutamakan pemenuhan standar pelayanan minimal dan dapat mengevaluasi secara berkala dengan kegiatan yang ada disetiap OPD. Dalam mengalokasikan belanja daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dalam memilih berbagai alternatif program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar di masyarakat antara lain pelayanan hak dasar masyarakat khususnya terkait dengan pendidikan dan kesehatan serta kemiskinan.
2. Fraksi demokrat berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan serta memaksimalkan Potensi-Potensi PAD, agar program-program yang ada untuk kepentingan langsung masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara efektif yang mana pendapatan asli daerah sangat menentukan berbagai kemungkinan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.
3. Dalam penggunaan anggaran agar diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pengeluaran pada kegiatan di bidang pendidikan , bidang kesehatan, transfer dana desa, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata, serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan dan kebijakan penyusunan belanja daerah harus berdasarkan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Saudara Bupati, Rapat Dewan yang terhormat...

Demikian Pandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bintan, kami fraksi demokrat menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih atas atensi peserta sidang yang terhormat ini dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 19 November 2018 Fraksi Partai Demokrat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, **Zulkifli, S.Pd** ditandatangani. Sekretaris, **Zulfaofi, SE** ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian pandangan umum Fraksi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepada juru bicara Fraksi disilahkan.

Umar Ali Rangkuti, A.Md / Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pagi/Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-Rekan wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan pada hari ini terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk memanjatkan do'a dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di ruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk menyesuaikan suatu proses pembahasan dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bintan.

Sholawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, Para sahabat dan umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum ini, demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Bupati /Wakil Bupati Bintan yang telah menyampaikan pengantar terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 pada kesempatan pertama.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 ini, kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagai catatan/masukan maupun saran, sebagai berikut :

1. Agar menjadi perhatian kita bersama, dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 ini hendaknya memperhatikan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat Minggu I bulan September bagi daerah yang menetapkan 5 (lima) Hari Kerja dan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, untuk itu Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2019 ini lepat waktu dan menghasilkan produk yang berkualitas untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Bintan ke depan.
2. Seperti yang pernah kami sampaikan pada Pandangan Umum Fraksi terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang lalu, bahwa pendapatan daerah merupakan sektor yang terpenting dalam APBD, karena seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini bisa terlaksana karena adanya pendapatan tersebut. Terkait dengan pendapatan daerah patut dipertanyakan turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,9 persen atau sekitar Rp14 miliar lebih dibanding APBD Tahun Anggaran 2018. Idealnya, target PAD ini harus terus ditingkatkan. Sebaliknya, pada komposisi Dana Perimbangan targetnya dinaikkan 6,12 persen atau sekitar Rp40 miliar lebih dibanding penerimaan pada APBD Tahun 2018. Hal ini menjadi pertanyaan dari kami karena penerimaan dari Dana perimbangan sulit dipastikan jumlahnya, target ini juga kontradiktif dengan permasalahan utama Pendapatan Daerah yang disampaikan di hal 12 Nota Keuangan APBD Tahun 2019, dimana pada point kedua disebutkan, ketidakpastian besaran dana transfer pemerintah pusat.

Fraksi kami berpendapat seharusnya pendapatan di sektor PAD yang lebih dimaksimalkan. Namun, tanpa menambah beban masyarakat Bintan. Ada sejumlah potensi yang bisa digarap lebih serius, seperti pengelolaan parkir kendaraan bermotor di kawasan-kawasan wisata, untuk potensi lain yang juga bisa digarap serius adalah pengelolaan labuh tambat kapal di pesisir Kabupaten Bintan. Untuk mengetahui potensi itu, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan bisa berkoordinasi dengan mitranya di Pemerintah Provinsi Kepri. Potensi lain yang bisa digarap lebih serius, adalah pengelolaan aset di luar wilayah Kabupaten Bintan.

3. Dari Struktur APBD Tahun 2019 yang disampaikan pada Nota Keuangan, komposisi jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung masih belum ideal, dengan persentase 49,32 persen untuk Belanja Tidak Langsung dan 50,68 persen untuk Belanja Langsung. disamping itu, masih terdapat Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang jumlahnya mencapai Rp.101 miliar atau hampir 20 persen dari total Belanja Langsung yang berjumlah sekitar Rp.577 miliar. Mohon dijelaskan peruntukkan Belanja pegawai tersebut? Karena sebagaimana kita ketahui bersama pada Tahun 2019 Kabupaten Bintan sudah sepenuhnya menerapkan sistem penggajian tunggal (*single salary*).
Perlu dijelaskan juga rincian Belanja Tidak Langsung di Dinas Pendidikan yang jumlahnya sekitar Rp.163 miliar. Jumlah itu jauh lebih besar dari belanja langsung di Dinas Pendidikan sekitar Rp 85,5 miliar, dengan komposisi tersebut, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur bidang pendidikan ini, walaupun secara umum persentase untuk urusan pendidikan sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pos anggaran Sekretariat Daerah untuk Belanja Makan Minum dan Alat Tulis Kantor (ATK) agar menjadi perhatian, jangan sampai permasalahan ini menjadi temuan dan menjadi perbincangan di media.
4. Mengingat permasalahan di tingkat nasional pada pos Belanja Bantuan Sosial (Bansos), mohon dijelaskan penggunaan belanja Bansos yang berjumlah sekitar Rp 12 miliar di APBD 2019 ini. Hal ini terkait dengan penjelasan di halaman 25, yang dinyatakan Belanja Bansos bisa diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Siapa dan apa kriteria individu serta keluarga yang berhak atas Belanja Bansos tersebut?
5. Pada BAB IV poin 4.2 dinyatakan masalah utama pembiayaan adalah untuk mencukupi kebutuhan defisit belanja, nilainya masih berupa prediksi. Ini tidak sejalan dengan prinsip penganggaran. Bahwa, sumber belanja harus perkiraan terukur nasional dan jumlah yang jelas. Apa solusi yang dilakukan Pemkab Bintan untuk memperbaiki masalah ini?
6. Yang juga perlu mendapat perhatian kita bersama mengenai jumlah Defisit pada Struktur APBD, sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2017 Pasal 3 ayat 1 huruf (e) bahwa batas defisit sebesar 3 persen.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 ini kami sampaikan. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas lebih lanjut, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. *Billahit auhq Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Bandar Seri Bentan, 19 November 2018. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, **Hj. Siti Maryani, S.Kom** ditandatangani. Sekretaris, **Umar Ali Rangkuti, A.Md** ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian pandangan umum Fraksi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada juru bicara Fraksi disilahkan.

Muttaqin / Fraksi Partai Keadilan Sejahtera :

Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sidang; Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan; Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bintan; Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan; Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang kami muliakan.

Pertama-pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Rabb semesta alam atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan konsep otonomi daerah adalah penyusunan APBD yang dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 331 bahwa : "Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 mengacu kepada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan acuan ini maka secara sistematis penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019 juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 agar dapat menyesuaikan dan mensinkronkan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Bintan, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan DPRD Kabupaten Bintan.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...

Berkenaan dengan telah disampaikannya RANPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, maka Fraksi PKS setelah mempelajari, menelaah dan membahas dengan seksama laporan dimaksud, selanjutnya memberikan masukan dan saran dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

1. Diawal Pandangan Umum ini Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah menyelesaikan tahapan penyusunan Anggaran tahun 2019 sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan sehingga penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019 bisa lebih awal disampaikan kepada DPRD, selanjutnya segera dapat dilakukan pembahasan bersama dan diharapkan sesuai dengan target akhir tahun 2018 Kabupaten Bintan bisa mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2019. Kesesuaian waktu ini sangat penting karena berhubungan dengan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat Kabupaten Bintan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada pemerintah daerah mencakup pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah dan pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan dana insentif (fiskal). Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan yang positif sehingga dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.050.333.155.085,- mengalami peningkatan 4,63% dibanding proyeksi Pendapatan pada APBD murni

Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.003.827.095.285,-. Peningkatan Pendapatan ini berasal dari Dana Perimbangan yaitu pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 693.872.576.000,-naik 6,12% dibanding Tahun Anggaran 2018 (murni) yang diproyeksikan sebesar Rp.653.872.576.000,-. Terkait dana perimbangan ini Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah Daerah agar berhati-hati karena realisasinya tergantung pemerintah pusat, meskipun semua sudah diatur ketentuannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sewaktu-waktu kebijakan bisa berubah yang menyebabkan proyeksi tidak tercapai, oleh karena itu perlu upaya maksimal agar segala ketentuan persyaratan dilengkapi dan upaya persuasif dan proaktif untuk terus menjaga dan mengejar target dana perimbangan ini kepada pemerintah pusat. Selain dari Dana Perimbangan, peningkatan Pendapatan Daerah juga berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan Rp. 116.700.914.000,- meningkat 22,64% jika dibanding Tahun Anggaran 2018 (murni) sebesar Rp. 95.153.914.000,-

3. Terkait dengan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 239.759.665.085,- apabila dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2018 (murni) sebesar Rp.254.800.605.285,- maka mengalami penurunan sebesar Rp. 15.040.940.200,- (6,12%). Penurunan 15 Milyar lebih ini cukup signifikan besarnya, oleh karena itu Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menjelaskan penyebab penurunan proyeksi PAD tersebut...? karena dalam permasalahan utama pendapatan daerah terkait PAD hanya dijelaskan masih lemahnya sistem pengelolaan PAD yang terintegrasi, bukankah Pemerintah Daerah telah memiliki 14 (empat belas) program strategi dan prioritas di bidang pendapatan terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan pemerintah daerah?
4. Fraksi PKS mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Fraksi PKS juga memberikan dukungan penuh serta memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas terlaksanakan program masuk sekolah SD dan SMP sederajat gratis disertai dengan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah untuk seluruh siswa yang baru masuk SD dan SMP sederajat di Kabupaten Bintan. Program ini hendaknya bisa terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dan mendapatkan prioritas dalam penganggarannya. Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.138.707.872.734,- naik sebesar 6,73% Rp.71.830.458.944,04 jika dibanding proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (murni) sebesar Rp.1.066.877.413.789,96,-. Dilihat dari kelompok belanja, untuk Tahun Anggaran 2019 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.561.571.192.834,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.577.136.679.900,-. Melihat komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung maka persentase perbandingannya adalah 49,32% : 50,56%. Dari perbandingan persentase ini Fraksi PKS memandang sudah cukup baik, namun FPKS tetap berharap kepada Pemerintah Daerah untuk terus berusaha agar perbandingan persentase antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung mencapai perbandingan yang ideal yaitu 40% : 60%.
5. Jika dilihat dari pengalokasian Belanja Daerah berdasarkan urusan, secara berturut-turut, maka yang paling besar pengalokasiannya adalah untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp.613.861.393.468,- (53,91%). Terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah telah dapat memenuhi alokasi belanja untuk Pendidikan yaitu 21,86% dari yang diamanahkan Undang-Undang sebesar 20%. Berikutnya yaitu alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp. 378.415.949.062,- (33,23%); kemudian belanja untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 114.000.740.638,- (10,01%) dan yang terakhir adalah belanja untuk Urusan Pilihan sebesar Rp. 32.429.789.566,- (2,85%).
6. Dari sisi pembiayaan FPKS berpandangan bahwa permasalahan utama pembiayaan daerah bahwa dalam mencukupi defisit belanja nilainya masih bersifat prediksi (sumber utama penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun Anggaran 2018) kepastiannya harus menunggu hasil audit dari BPK, sementara prinsip

penganggaran bahwa sumber belanja (pendapatan) harus merupakan perkiraan yang terukur dan rasional serta jumlah yang jelas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam memproyeksikan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA harus menjaga prinsip kehati-hatian karena hal terkait dengan Defisit Belanja Tahun Anggaran 2019. Pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 dari sisi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.90.374.717.649,- sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.000,- (untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah) sehingga Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.88.374.717.649,- yang akan digunakan untuk menutupi Defisit Belanja pada Tahun Anggaran 2019.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Tahun Anggaran 2019. Apa yang menjadi masukan, catatan dan pertanyaan hendaknya diberikan tanggapan dan jawaban yang proporsional. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis dan butuh kajian mendalam, Fraksi PKS akan menggali dan mendiskusikannya pada pembahasan-pembahasan dalam Komisi maupun Badan Anggaran sesuai mekanisme yang ada. Selanjutnya fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Bandar Seri Bentan, 19 November 2018 M / 20 Rabi'ul Awwal 1440 H. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang. Ketua, **Drs. Raja Miskal** ditandatangani. Sekretaris, **Sahak** ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian pandangan umum Fraksi dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada juru bicara Fraksi disilahkan.

Hesti Gustrian, S.ST / Fraksi Partai Amanat Nasional :

Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Bintang terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2018. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintang. Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang. Yang terhormat saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang. Yang terhormat saudara Camat/Lurah Dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintang. Yang terhormat saudara Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Lembaga Penyiaran serta para undangan yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintang, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat, berkah, serta ridho-nya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir maupun bathin.

Shalawat teriring salam selalu kita kirimkan kepada Nabi Muhammad *Sholallahu Alaihi Wassalam* dan Ssmoga kita semua termasuk ummat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Aamiin.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan menelaah dengan seksama terhadap pidato Bupati Bintang dalam rangka penyampaian ranperda serta dokumen pendukungnya, dan dengan mencermati berbagai dinamika yang berkembang di kabupaten bintang saat ini, maka kami dari Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bintang menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

Terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bintang 2019, Fraksi PAN menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Fraksi PAN DPRD Kabupaten bintang berpendapat bahwa sesuai Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2019, telah dijelaskan persetujuan bersama antara Bupati Bintang dan DPRD terhadap Ranperda APBD 2019 paling lambat tanggal 30 november 2018. kenyataannya, saudara Bupati baru menyampaikannya pada pertengahan november ini. artinya kita hanya mempunyai waktu 12 hari sebelum pengesahan ranperda ini. tentu ini menjadi catatan tersendiri, karena untuk menghasilkan perda yang berkualitas kita membutuhkan sebuah proses agar tidak tergesa-gesa tergesa-gesa dan menghasilkan hasil yang pro terhadap masyarakat.
2. Fraksi PAN menggaris bawahi bahwa komposisi terhadap total belanja antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2019 ini menunjukkan komposisi yang belum ideal. Belanja langsung mencapai 50,68 persen sedangkan belanja tidak langsung hanya 49,32 persen dari total APBD. Dengan kondisi seperti ini kami menilai komposisi ini tidak pro terhadap rakyat. *Mohon penjelasan saudara Bupati terkait hal ini.*
3. Pembahasan APBD Kabupaten Bintang tahun 2019 ini dilakukan di tengah-tengah keprihatinan kita terhadap kondisi perekonomian daerah ini. Banyak investor menutup usahanya dan menyisakan masalah pengangguran. Selain itu, inflasi yang tidak stabil menyebabkan daya beli masyarakat Kabupaten Bintang semakin terus melemah. Sebagaimana kita ketahui, APBD dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Karena itu, kami berharap dasar berpikir utama dalam penyusunan APBD kali ini ialah merancang program-program yang pro terhadap tumbuh kembangnya usaha ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan pekerjaan baru. Kami melihat bahwa sejak terpilihnya, saudara Bupati dan Wakil Bupati, belum ada terobosan riil di bidang pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah. Karena itu, kami meminta penjelasan dari saudara Bupati terkait hal ini. *Apakah kebijakan-kebijakan yang akan saudara Bupati ambil dalam menyikapi kondisi perekonomian daerah seperti saat ini? Mohon penjelasan.*
4. Masih terkait dengan pokok pikiran nomor 3 di atas, kami juga meminta penjelasan kepada saudara Bupati, kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Bintang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri sampai Agustus 2018 lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bintang adalah yang tertinggi kedua setelah Kota Batam, yakni mencapai 5,89 persen. Berdasarkan pendapat kami, APBD yang dikelola dengan baik akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. *Oleh karena itu, kami meminta penjelasan kepada saudara Bupati terkait hal ini.*
5. Berdasarkan Permendagri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019. ada sejumlah target nasional yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen. Tentu ini adalah tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bintang khususnya dan Provinsi Kepri pada umumnya, mengingat angka pertumbuhan ekonomi kita hingga triwulan-II 2018 sebesar 4,51 persen atau masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,27 persen. APBD yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. *Oleh karena itu, kami meminta penjelasan saudara Bupati, kebijakan apa yang akan dilakukan dalam upaya kita mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat di atas. Mohon penjelasan.*

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan memberikan sejumlah masukan sebagaimana dijabarkan di atas, maka kami dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintang menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus.

Demikianlah pandangan umum fraksi PAN DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda ini. Bila ada yang terlebih dan terkurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Bintan akan terus berkembang menjadi Kabupaten maju di Provinsi Kepri. Billaahit taufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Sri Bintan, 19 November 2018. Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan. Ketua, **Hesti Gustrian, S.ST** ditandatangani. Sekretaris, **Eddy Tiawarman, SP** ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian pandangan umum Fraksi dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan. Kepada juru bicara Fraksi disilahkan

Andreas Salim / Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Pandangan Umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Bupati Bintan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Seluruh Unit Kerja Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan tahun 2019. Shalawat serta salam kepada junjungan semesta alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua senantiasa mendapat safaat nya menjadi umat yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, Kami Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan tidak banyak yang kami sampaikan didalam Pandangan Umum, berkaitan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bintan Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Maka Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan memberikan pandangan sebagai berikut :

1. Pada pembahasan mengenai Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah point a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 239.759.665.085,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah) apabila dibandingkan dengan PAD tahun anggaran 2018 (sebelum perubahan) sebesar Rp.254.800.605.285,- (dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus juta enam ratus lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau mengalami penurunan sebesar 5,9 persen. Mohon penjelasan mengenai hal tersebut!
2. Pada Pembahasan mengenai kondisi dan kebijakan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 secara garis besar mengalami peningkatan. Pada RAPBD 2019 direncanakan

sebesar Rp.1.138.707.872.734,- (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sedangkan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 (sebelum perubahan) sebesar Rp.1.066.877.413.789,96 (satu triliun enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah). Mengalami kenaikan sebesar 6,73 persen. Mohon Penjelasan Berkaitan hal tersebut!

3. Pada point 1 dan 2 diatas menunjukkan hal berbeda. Rancangan anggaran pendapatan mengalami penurunan, sedangkan pada Rancangan Anggaran Belanja mengalami penurunan. Mohon penjelasan!
4. Pada point permasalahan utama Belanja Daerah, terdapat 3 permasalahan yakni: a) Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); b) Konsep skala prioritas terhadap pengajuan belanja; dan c) Kesenjangan antara kebutuhan riil belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Mohon penjelasan, bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut!

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan untuk diberikan penjelasan. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufuk walhidayah wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bintan, 19 November 2018 Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan Kabupaten Bintan 2018. Ketua, **Drs. Muhammad Zuhdi** ditandatangani. Sekretaris, **Helmy, SH** ditandatangani.

Protokol :

Unsur Pimpinan, Bupati dan Wakil Bupati Bintan disilahkan mengambil tempat didampingi Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepala BP3D dan Kepala DPKAD Kabupaten Bintan. Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati Bintan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan.

(Pelaksanaan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati Bintan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan)

Dilanjutkan dengan penyerahan Pandangan Umum Fraksi-fraksi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan kepada Bupati Bintan

(Pelaksanaan penyerahan Pandangan Umum Fraksi-fraksi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan kepada Bupati Bintan)

Unsur Pimpinan, Bupati dan Wakil Bupati Bintan serta Kepala Badan disilahkan kembali ke tempat. Tanggapan dan jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi, kepada Bapak disilahkan.

H. Apri Sujadi, S.Sos / Bupati Bintan :

Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dan Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia;

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

Sebelum sampai pada materi rapat Paripurna, melalui kesempatan ini pula kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Anggota Dewan, melalui Fraksi-Fraksi, yang telah mempelajari dengan sungguh-sungguh dan seksama atas Rancangan Perda sebagaimana tersebut diatas, yang telah menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicaranya masing-masing. Semua pandangan yang disampaikan, tentunya merupakan masukan yang sangat berharga, dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Komisi maupun rapat-rapat Badan Anggaran untuk penyempurnaan Ranperda tersebut.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan (F-GHNP) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, bersama ini akan kami sampaikan penjabaran dan/atau tanggapan atas pandangan dari seluruh Fraksi.

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Terima kasih atas saran dan masukan yang telah disampaikan terhadap Ranperda APBD 2019 dan kami akan tetap konsisten dan berpedoman kepada peraturan yang telah ditentukan baik Penganggaran Pendapatan, Anggaran Belanja maupun Pembiayaan. Dalam hal merealisasikan Anggaran kami akan tetap memperhatikan hal-hal seperti Aspiratif, Kooperatif serta memperhatikan kewajiban mandatori Alokasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Belanja Modal sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Terimakasih atas saran dan masukan, Pemerintah Daerah akan berupaya menyusun dan menganggarkan Program Kegiatan sesuai Skala Prioritas dan mengutamakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta memperhatikan Porsi Alokasi Dana Pendidikan dan Kesehatan sesuai kebutuhan terutama untuk Program Pelayanan Dasar yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah akan tetap Konsisten dalam Mengalokasikan Anggaran agar dapat dimanfaatkan secara optimal atas semua potensi dan sumber pendapatan dalam membiayai Program Kegiatan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada RPJM dan Rensra OPD yang telah disusun.
3. Sedangkan penyusunan dan Penggunaan Anggaran berbasis Kinerja diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pengeluaran baik Alokasi Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Belanja Modal dalam hal ini untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara merata untuk penanggulangan kemiskinan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah disampaikan terhadap Ranperda APBD 2019 dan kami akan tetap konsisten dan berpedoman kepada peraturan yang telah ditentukan baik Penganggaran Pendapatan, Anggaran Belanja maupun Pembiayaan. Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah tetap memperhatikan dan berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah dimulai sejak tanggal 24 Juli 2018 yaitu

50,68 %. Untuk komposisi tersebut kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam untuk mencapai tingkatan ideal dalam penganggaran. Terkait hal tersebut bahwa tahun 2019 Kabupaten Bintan telah menerapkan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS Bintan, disamping itu, masih terdapat Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang jumlahnya mencapai Rp.101 M atau hampir 20 % dari total Belanja Langsung yang berjumlah sekitar Rp.577 M yang akan diperuntukkan bagi belanja pegawai non PNS dan honorarium nara sumber di 39 perangkat daerah, karena ada perubahan terhadap pola perhitungan tambahan penghasilan PNS sesuai harga jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Tidak Langsung di Dinas Pendidikan yang jumlahnya sekitar Rp 163 M dan jumlah itu jauh lebih besar dari belanja langsung di Dinas Pendidikan sekitar Rp 85,5 M. Belanja Tidak Langsung di Dinas Pendidikan lebih besar dikarenakan jumlah tenaga pendidikan dan pendukungnya sebanyak 1.266 orang yang merupakan 40% dari jumlah PNS di Kabupaten Bintan yang berjumlah 3.168 orang.

Di pos anggaran Sekretariat Daerah untuk Belanja Makan Minum dan Alat Tulis Kantor (ATK) akan menjadi perhatian.

4. Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terakhir diubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan sebagai berikut, pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
5. Terhadap masalah utama pembiayaan yang mana sumber belanja harus perkiraan terukur rasional dan jumlah yang jelas, Pemerintah Daerah mengatasi permasalahan tersebut dengan penggunaan Silpa tahun anggaran 2018.
6. Jumlah Defisit pada Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Bintan akan memperhatikan dan mempedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2017 Pasal 3 ayat 1 huruf (e) bahwa batas defisit sebesar 3 %.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Terkait pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah tetap memperhatikan dan berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah dimulai sejak tanggal 24 Juli 2018 yaitu dengan menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2019, dan penandatanganan MOU telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018.
2. Dari struktur APBD Tahun 2019 yang disampaikan pada nota keuangan, komposisi jumlah Belanja Tidak Langsung dengan persentase 49,32 % dan untuk Belanja Langsung sebesar 50,68 %. Untuk komposisi tersebut kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam untuk mencapai tingkatan ideal dalam penganggaran. Dalam belanja tidak langsung tidak hanya terdiri dari belanja pegawai saja namun terdapat belanja hibah dan bantuan sosial yang pro terhadap rakyat.

3. Kebijakan-kebijakan yang akan di ambil dalam menyikapi kondisi perekonomian daerah antara lain :
 1. Meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat lebih produktif dan memiliki daya saing
 2. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Bintan
 3. Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah diselaraskan dengan potensi pengembangan Kabupaten Bintan di sektor pariwisata dan perikanan.

4. Kebijakan tersebut didukung didalam R-APBD Kabupaten Bintan Tahun 2019 dengan melaksanakan program-program pembangunan seperti Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan UMKM, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Pengembangan Kemitraan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menyikapi kondisi perekonomian yang fluktuatif akan terus berupaya untuk memaksimalkan peningkatan investasi di segala sektor khususnya pariwisata dan perikanan, upaya-upaya tersebut secara nyata tertuang dalam Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal. Program-program ini diyakini mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan tetap berada pada jalur yang tepat .

Disisi ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terus berkomitmen untuk menekan tingkat pengangguran melalui berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pencari kerja. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bintan juga berupaya menjembatani informasi lowongan pekerjaan kepada pencari kerja, adapun usaha-usaha tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan dan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

5. Pertama, peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal mutlak diperlukan. SDM harus dipersiapkan sebagai insan yang berdaya saing regional bahkan global.

Kedua, mewujudkan keunggulan di sektor pariwisata yang sudah ada di Kabupaten Bintan dengan didukung oleh perbaikan sarana transportasi, infrastruktur, event kebudayaan baik rutin maupun seasonal dan SDM terlatih.

Ketiga, Sektor pertanian terutama di bidang perikanan perlu menjadi prioritas terutama dengan adanya dukungan program nasional untuk pembangunan kawasan minapolitan di beberapa pulau di Kabupaten Bintan. Tetapi produksi perikanan maupun pertanian masih sangat terbatas akibat kondisi cuaca yang masih tidak menentu.

Keempat, mengefektifkan pengeluaran pemerintah pada tahun 2019 dan pemanfaatannya diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang mendorong berkembangnya peran serta masyarakat. Sementara itu, untuk menahan laju perlambatan ekonomi, dan mengarahkannya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan upaya penguatan ekspor dan pengendalian impor melalui langkah-langkah seperti diversifikasi pasar dan produk serta tujuan ekspor, percepatan perbaikan infrastruktur pendukung ekspor yang belum optimal juga harus terus dilakukan.

6. FRAKSI GERAKAN HATI NURANI PERUBAHAN (F-GHNP)

Terkait Pandangan umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan APBD tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.239,75 M apabila dibandingkan dengan PAD tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan sebesar Rp.239,75 M mengalami penurunan sebesar 5,9 %. Perlu kami jelaskan bahwa Anggaran PAD Tahun 2019 memang

mengalami penurunan karena adanya regulasi baru berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penganggaran Dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dimana pada tahun 2018 dianggarkan pada pos PAD sebesar Rp.21,54 M tetapi pada tahun 2019 dianggarkan pada pos penerimaan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Yang Sah sehingga target PAD tahun 2019 berkurang sebesar Rp.21,54 M. Disamping itu dalam RAPBD 2019 target penerimaan pajak telah dinaikan menjadi Rp.192,45 M sebelumnya tahun 2018 Rp.187,45 M sedangkan target redistribusi diturunkan menjadi Rp.9,69 M sebelumnya Rp.10,87 M.

2. Pada RAPBD 2019 belanja direncanakan sebesar Rp.1.138,70 M sedangkan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 (sebelum perubahan) sebesar Rp.1.066,87 M atau mengalami kenaikan sebesar Rp 71,83 M atau sebesar 6,73 % hal tersebut disebabkan adanya potensi penerimaan daerah yang meningkat terutama berasal dari pendapatan pajak PAD dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari dana perimbangan. Kenaikan pendapatan daerah tersebut yang dialokasikan untuk peningkatan belanja tahun 2019 seiring dengan kenaikan kebutuhan untuk belanja pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Pada RAPBD 2019 Anggaran PAD mengalami penurunan sebesar 5,9 % sedangkan Anggaran belanja direncanakan meningkat sebesar 6,73 %. Perlu kami jelaskan dalam konteks seluruh penerimaan daerah Kabupaten Bintan tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.050,33 M dibandingkan Rp.1.003,82 M pada Tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.46,51 M walaupun kalau dilihat dari sisi PAD yang merupakan bagian dari pendapatan daerah mengalami penurunan. Kenaikan pendapatan tahun 2019 disebabkan kenaikan bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.86,10 M dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp.46,10 M. Berdasarkan kenaikan target pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan diperkenalkannya penganggaran defisit sampai 3% dari total pendapatan daerah yang nantinya ditutup dengan dana yang bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya. Alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA dan RPJMD.
4. Pada point permasalahan utama belanja daerah, terdapat 3 permasalahan yakni: a) penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); b) Konsep skala prioritas terhadap pengajuan belanja; dan c) Kesenjangan antara kebutuhan riil belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Mohon penjelasan, bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- a. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja pada setiap usulan program dan kegiatan yang akan di biayai melalui anggaran pemerintah daerah. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan output atau keluaran yang diharapkan dari dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Konsep skala prioritas terhadap pengajuan belanja, dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan (RKPD dan RPJMD) sudah ditentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas pengajuan belanja dalam R-APBD tahun 2019. Sehingga diharapkan di dalam R-APBD Kabupaten Bintan tahun 2019 prioritas pembangunan yang sudah direncanakan dapat tercapai.

- c. Kesenjangan antara kebutuhan riil belanja dengan kemampuan keuangan daerah, dari kebutuhan riil belanja yang masuk ke dalam usulan perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan, pemerintah daerah memetakan kembali usulan kegiatan tersebut dengan memberikan tingkatan prioritas dengan memfokuskan terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan tersebut yang menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi belanja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh segenap Fraksi DPRD Kabupaten Bintan. Besar harapan kami untuk kita sama-sama berkomitmen terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit, untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah serta dalam proses penganggaran agar dapat mengikuti mekanisme perencanaan sehingga seluruh usulan dan prioritas program kegiatan dapat diakomodir diawal proses perencanaan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/keurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Sehingga pada akhir pembahasan pada Badan Anggaran, belanja daerah dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan tidak menimbulkan defisit anggaran.

Demikian jawaban secara garis besar atas pandangan umum fraksi-fraksi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa jawaban atau penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum. Oleh karenanya, untuk penjelasan secara lebih rinci dan lebih teknis mengenai berbagai hal yang masih perlu didalami, dapat kiranya nanti dibahas pada kesempatan rapat-rapat Badan Anggaran. Sedangkan saran-saran yang telah disampaikan oleh seluruh Fraksi pada prinsipnya kami dapat menerima dan akan diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata billahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 19 November 2019. Bupati Bintan, *H. Apri Sujadi, S.Sos* ditandatangani).

Protokol :

Penutupan Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Bupati Bintan yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas pandangan Fraksi-fraksi DPRD, sehingga harapan kita bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 ini, dapat dikelola dengan pengetahuan yang optimal dan penerapannya berprinsip kepada kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berdasarkan kepada ketepatan waktu, transparan, partisipasif dan berazaskan kepada keadilan, objektivitas dan kepatuhan. Kegiatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dengan memakai skala prioritas yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat haruslah mendapatkan perhatian serius.

Demikian rangkaian acara telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada para hadirin dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirobbil alamin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan ini resmi saya tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

- dengan menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2019, dan penandatanganan MOU telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018.
2. Pemerintah Daerah akan berhati-hati dalam penganggaran dana perimbangan karena realisasinya tergantung Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk dilengkapi serta melakukan upaya persuasif dan proaktif untuk terus menjaga dan mengejar target dana perimbangan ini kepada Pemerintah Pusat.
 3. Kebijakan APBD tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.239,75 M apabila dibandingkan dengan PAD tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan sebesar Rp.239,75 M mengalami penurunan sebesar 5,9 %. Perlu kami jelaskan bahwa Anggaran PAD Tahun 2019 memang mengalami penurunan karena adanya regulasi baru berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penganggaran Dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dimana pada tahun 2018 dianggarkan pada pos PAD sebesar Rp.21,54 M tetapi pada tahun 2019 dianggarkan pada pos penerimaan hibah pada Lain-lain Pendapatan Yang Sah sehingga target PAD tahun 2019 berkurang sebesar Rp.21,54 M. Disamping itu dalam RAPBD 2019 target penerimaan pajak telah dinaikan menjadi Rp.192,45 M sebelumnya tahun 2018 Rp.187,45 M sedangkan target redistribusi diturunkan menjadi Rp.9,69 M sebelumnya Rp.10,87 M.
 4. Dari struktur APBD Tahun 2019 yang disampaikan pada nota keuangan, komposisi jumlah Belanja Tidak Langsung dengan persentase 49,32 % dan untuk Belanja Langsung sebesar 50,68 %. Untuk komposisi tersebut kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam untuk mencapai tingkatan ideal dalam penganggaran.
 5. Terhadap masalah utama pembiayaan yang mana sumber belanja harus perkiraan terukur rasional dan jumlah yang jelas, Pemerintah Daerah mengatasi permasalahan tersebut dengan penggunaan Silpa tahun anggaran 2018 dan tetap memegang prinsip kehati-hatian.
- 4. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)**
- Terkait Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah tetap memperhatikan dan berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah dimulai sejak tanggal 24 Juli 2018 yaitu dengan menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2019, dan penandatanganan MOU telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018.
 2. Kebijakan APBD tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.239,75 M apabila dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan sebesar Rp.239,75 M mengalami penurunan sebesar 5,9 %. Perlu kami jelaskan bahwa Anggaran PAD Tahun 2019 memang mengalami penurunan karena adanya regulasi baru berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penganggaran Dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dimana pada tahun 2018 dianggarkan pada pos PAD sebesar Rp.21,54 M tetapi pada tahun 2019 dianggarkan pada pos penerimaan hibah pada Lain-lain Pendapatan Yang Sah sehingga target PAD tahun 2019 berkurang sebesar Rp.21,54 M. Disamping itu dalam RAPBD 2019 target penerimaan pajak telah dinaikan menjadi Rp.192,45 M sebelumnya tahun 2018 Rp.187,45 M sedangkan target redistribusi diturunkan menjadi Rp.9,69 M sebelumnya Rp.10,87 M.
 3. Dari struktur APBD Tahun 2019 yang disampaikan pada nota keuangan, komposisi jumlah Belanja Tidak Langsung dengan persentase 49,32 % dan untuk Belanja Langsung sebesar

Sebelum saya akhiri izinkan saya menyampaikan 2 (dua) bait pantun, yakni :

Mencari beras singgah ke pasar raya
Beras dimasak tuk hidangan bersama
APBD 2019 agendakan pembahasannya
Akhir Nopember target pengesahannya
Putihnya melur diujung dahan
Bunga kamboja elok rupawan
Terima kasih kami ucapkan
Atas kehadiran para undangan

Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Protokol :

Demikian Rapat Paripurna pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.18 wib.

Notulis,



NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum



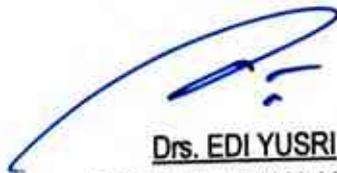
RAMLAH, S.Sos
NIP.19711106 199803 2 009

Kasubag Risalah dan Persidangan



RONY FRANTHA, S.Sos
NIP.19760112 200604 1 015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19671108 199002 1 004

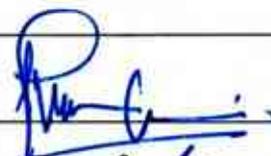
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
K E T U A,

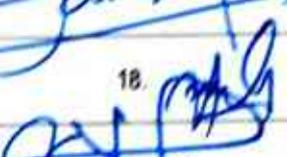


H. NEBAR AHMAD, S.IP

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019**

HARI : SENIN
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
WAKTU : 14.05 S/D 15.18 WIB
ACARA : 1. PENYAMPAIAN/PENJELASAN KEPALA DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2019.
2. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
3. JAWABAN/TANGGAPAN KEPALA DAERAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5.
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7.
8	Ir. ARIF JUMANA S	WAKIL KETUA KOMISI II	8.
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10.
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13.
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15.

✓ 16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
✓ 17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17. 
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
✓ 23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. 
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,


H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

HARI : SENIN
 TANGGAL : 19 NOVEMBER 2018
 WAKTU : 14.05 S/D 15.18 WIB
 ACARA : 1. PENYAMPAIAN/PENJELASAN KEPALA DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2019.
 2. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
 3. JAWABAN/TANGGAPAN KEPALA DAERAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.	Wan Rudy Iskandar	Ka. BP3D	3.
4.	ANTOMO	Kasi Pmbd. CR Distabpora	4.
5.	M. PANCA AZDIGOENIA	Kalok BPBD	5.
6.	Syahrifadi	Kabid SDA Pal PP	6.
7.	SAMSUDINA	Kasi Bin/MS/PAU-PP	7.
8.	MISWANINGI	Kasi Transk. MLC PP	8.
9.	Rahde	Kasi pub Pmbd	9.
10.	Rahardian	Kabid Kesbangpol	10.
11.	Naharudin	Kabid Sosial	11.
12.	M. Syafnur	Kabed Janchisos Dmsos	12.
13.	Sri Martini	Kabid	13.
14.	NASRULLAH	Kasubag Fas. Keagm. Desra	14.
15.	HASNA BASRI	Kabid Icd/Ly BPBD.	15.
16.	MUHAMMAD MIKAS	Kasid KE BPBD	16.
17.	M. Ali Bazar. M	Kasid Satpol	17.
18.	ELINDA	Sekretaris. DPS LCB	18.
19.	IRFAN	Kasubag Angub	19.
20.	HM Zulfakar	Kasubag TI	20.

50.	Yandriyge	Kaditub	50	
51.	Mohriah	BKAD	51	
52.	Devi . H	Kesra	52	
53.	SPi widayati	Kesra BICPPD	53.	
54.	KHAMISAH	Kasubbag UMUM BKPPD.	54.	
55.	JAMSURI	KesGangPOL	55.	
56.	ARIF SUKARNO	Ht. Camat Gunung Karang	56.	
57.	Milpaul	BICPPD	57.	
58.	ARDIANSYAH	Pabid BKPPD	58.	
59.	nur-hati L.	Kasubag Um - PA	59.	
60.	Rya Tambunan	YDPSKS.	60.	
61.	Cri Hartuti		61.	
62.	Rusli	Camat B. Timor	62.	
63.	RIGALD	Kades TP4	63.	
64.	ANERAD U.	SAS. PEMERINTAHAN	64.	
65.	Walayar Rachman	Lurah Kawal	65.	
66.	MADHULAH RA-	APR- BUNTAN.	66.	
67.	YUZET	BPPRD	67.	
68.			68.	
69.			69.	
70.			70.	
71.			71.	
72.			72.	
73.			73.	
74.			74.	
75.			75.	
76.			76.	
77.			77.	
78.			78.	